EXECUTIVE SUMMARY

LAPORAN PENELITIAN INDIVIDUAL

DEHUMANISASI ANAK

(Studi Tentang Faktor Penyebab Dehumanisasi Anak Pada Komunitas Urban Dan Pola Penanganannya Berbasis Lembaga Sosial)

OLEH:

DRS. H. NADHIR SALAHUDDIN, M.A.

NIP. 197107081994031001

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SUNAN AMPEL

2013

A. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga orang lain walaupun itu orang tua maupun kerabat, tidak boleh merampas hak-hak anak. Hak anak cukup banyak dicantumkan dalam undang-undang seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002bab III pasal 4 sampai pasal 19 tentang hak anak. Perangkat hukum lain yang sudah disiapkan untuk melindungi anak antara lain Kepres RI No.59/2002 (RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak); Kepres RI No. 88/2002 (RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak); dan UU No. 39/1999 (UU HAM). Dengan demikian perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kokoh.

Penjelasan lain untuk melihat kondisi anak yang terlantar juga tidak bisa melupakan faktor lingkungan, dimana anak mengalami proses tumbuh kembang. Keluarga adalah komponen pertama yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Mencuatnya fenomena anak terlantar harus menengok pula faktor struktural yang dipicu oleh kemiskinan yang mendera keluarga di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin per Maret 2013 mencapai 28,07 juta atau 11,37 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut mengalami penurunan 0,52 juta dibandingkan dengan penduduk miskin per September 2012 sebesar 28,59 juta (11,66) persen. [1] Walaupun nampak secara kuantitatif mengalami penurunan, namun hal yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa wajah kemiskinan di Indonesia muncul karena ’sistem’ yang diciptakan oleh negara dengan tidak memberi peluang untuk memberikan perhatian yang cukup besar kepada pihak yang kurang beruntung. Kondisi ini mengakibatkan semakin meningkatnya permasalahan sosial termasuk permasalahan sosial anak. Kemiskinan yang bersumber dari ketidak-berdayaan secara ekonomi akibat krisis, masih merupakan penyebab utama munculnya problem tersebut. Jumlah keluarga yang tidak mampu semakin meningkat, dan

[1] http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/08/18/mrpo4p-tingkat-kemiskinan-2013-akan-lebih-tinggi-dari-target-pemerintah diakses tanggal 20 Nopember 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa dipungkiri akan semakin menambah jumlah anak yang kehilangan kesempatannya dalam mendapatkan pendidikan yang memadai dan harapan hidup yang lebih baik. Akibatnya, jaminan hidup yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin ikut dirampas baik secara materiil maupun psikologis. Mereka mengalami ketidakadilan dalam memperoleh hak-hak mereka sebagai anak yang merdeka.

Problem sosial anak pun juga sudah selayaknya tidak bisa terlepas dari peranan dan kebijakan negara yang belum tuntas dan komprehensif ditangani. Keberpihakan negara terhadap para pemilik modal, penguasa dan makelar tanah dan makelar kasus, tanpa berpihak pada kelompok marjinal, berdampak pada semakin banyaknya warga negara Indonesia yang hidup tanpa martabat. Integritas tidak selalu harus dipertautkan dengan kepemilikan material, tetapi martabat mempunyai kaitan dengan hak-hak dasar manusia untuk diperlakukan dan ditangani secara manusiawi. Kebijakan yang berpihak kepada kelompok penguasa dan para kapitalis merupakan sumber bencana sosial, yang tidak kalah dahsyatnya dari bencana alam. Proses peminggiran masyarakat secara sistematik jelas tampak pada keberpihakan pemerintah pada para elit dan pemilik modal, dan menomorduakan kelompok tersebut. Proses yang direncanakan atau tidak direncanakan masuk ke ranah eksklusi sosial dengan dampak masif dan sulit diatasi.

Masalah sosial anak, dimana anak merupakan kelompok yang tergolong akan tumbuh menjadi kelompok usia produktif dan merupakan sumber daya manusia yang akan menjadi penerus bangsa, tidak mendapat perhatian yang cukup baik oleh negara. Prioritas konstitusional agar negara berperan aktif dalam membangun manusia agar lebih bermartabat, menjadi antitesis dengan kondisi objektif mutu hidup manusia Indonesia saat ini terlebih dengan mencuatnya berbagai masalah sosial anak yang meliputi berbagai kriteria seperti: *child abuse*, pekerja anak di sektor berbahaya, anak-anak yang dilacurkan, anak jalanan, anak terlantar, anak perempuan korban pelecehan dan kekerasan seksual, perdagangan dan penculikan anak, anak korban *pedofilia*, pengungsi anak adan anak-anak yang putus sekolah dan rawan DO. Martabat (*integrity*) manusia Indonesia menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buram karena balutan kemiskinan, dan mutu hidup mayoritas manusia Indonesia yang masih di bawah standar minimum. Di tambah dengan jaringan sosial sangat minim dikembangkan lintas institusi negara, institusi keagamaan, institusi etnis, dan institusi golongan. Penanganan anak terlantar dan yatim piatu hanya menjadi dominasi lembaga pemerintah (Kementerian Sosial); dan institusi lainnya yang didaulat untuk ikut berpartisipasi, sebab ketiadaan dana, daya dan sumberdaya manusia yang memadai namun tidak bisa berjalan maksimal. Sekat-sekat kelembagaan dalam menangani kelompok marjinal tampaknya belum berubah sejak rezim Orde Baru, bahkan hegemoni dan dominasi negara begitu menonjol.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses dehumanisasi terjadi pada anak-anak terlantar yang menjadi penghuni pondok pesantren Al-Hafizh? 2) Bagaimana upaya pondok pesantren Al-Hafizh dalam menangani permasalahan anak-anak terlantar?

Tujuan penelitian dengan mengangkat tema dehumanisasi anak adalah: 1) Mendeskripsikan dan menjelaskan proses dehumanisai pada anak-anak terlantar yang menjadi penghuni pondok pesantren Al-Hafizh. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya marginalisasi yang dialami anak anak terlantar, yang juga secara khusus akan menekankan pada komunitas urban di Surabaya. 2) Mendeskripsikan dan menjelaskan pola penanganan anak-anak terlantar yang telah dilakukan oleh pondok pesantren Al-Hafizh. Lembaga ini menjadi menarik untuk dikaji, karena sekilas menunjukkan bahwa lembaga tersebut terkesan mandiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Dalam tradisi fenomenologi ini peneliti ingin mengungkap dan menelanjangi ”kesadaran terdalam” (*depth-consciousness*) subjek penelitian (*subject matter*) tentang permasalahan proses terjadinya dehumanisasi anak pada komunitas urban di Surabaya dan pola penanganannya yang berbasis lembaga sosial. Peneliti akan memahami lingkungan fisik, lingkungan sosial, intersubyektifitas (interaksi antarmanusia) dan nilai-nilai yang dihayati oleh informan secara mendalam terhadap dunia konseptual subjek penelitian. Tehnik pengumpulan data dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui wawancara baik individu maupun kelompok, observasi dan dokumentasi. Tehnik analisa data dilakukan melalui proses reduksi, display dan verifikasi.

B. PESANTREN SEBAGAI PUSAT PENANGANAN ANAK YATIM, MISKIN, DAN TERLANTAR

1. Pesantren dan Pengembangan Masyarakat

Peran pesantren dalam pengembangan masyarakat secara umum dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama,* Peranan Instrumental dan Fasilitator. Dalam realitas operasional ternyata pondok pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan namun juga sebagai lembaga pemberdayaan umat. Pondok pesantren menjadi sarana bagi pengembangan potensi dan pemberdayaan umat, sehingga menyediakan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pemberdayaan itu sendiri. Pesantren berperan sebagai alat atau instrumen pengembangan potensi dan pemberdayaan umat. Adanya alat atau instrumen pendidikan (*workshop*) di pondok pesantren menunjukkan pesantren tidak saja sebagai objek namun berperan sebagai fasilitator. Peranan ini merupakan peranan yang *elementer* bagi masyarakat dan santri sendiri dalam mengupayakan ketrampilan yang kelak dapat menjadi bekal hidup.

Kedua, Peranan Mobilisasi. Pondok pesantren tidak terlepas dari kharisma Kyai. Kepercayaan masyarakat terhadapnya menjadikan pesantren sebagai tempat yang terhormat dan lembaga yang tepat membangun *akhlaqul karimah* dan budi pekerti yang santun.

Ketiga, Peranan Penyedia Sumber Daya Manusia Berkualitas. Hal itu dapat ditunjukkan dalam membantu tugas pemerintah dalam upaya pemerataan kegiatan pengembangan, khususnya ekonomi di daerah. Dengan harapan agar daerah memiliki potensi sumber daya manusia yang kompeten.

Keempat, sebagai *Agent of Development*. Secara historis, pesantren muncul sebagai respon terhadap situasi dan kondisi sosial masyarakat yang tengah dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral agama. Dengan melalui transformasi nilai yang ditawarkan, pondok pesantren melakukan pembebasan dari segala kebuntuan bahkan keterpurukan berupa pemiskinan pengetahuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun pemiskinan ekonomi. Maka di sini lah kehadiran pesantren bisa disebut agen perubahan sosial (*agent of social change*).

Kelima, sebagai *Center of Excellence.* Pesantren dengan kekhasan metodologi pengajarannya telah membuktikan kemampuannya dalam mentransformasikan ajaran agama ke tengah-tengah masyarakat yang heterogen dan kompleks. Keberadaan sosial budaya dan nilai yang telah lebih dulu mapan diterima masyarakat tidak menjadi penghalang proses transformasi Islam, bahkan dalam banyak hal justru menjadi pemicu kedinamisan penerimaan nilai-nilai Islam di masyarakat.[2]

Pondok pesantren, disamping dikenal sebagai lembaga yang berperan dalam upaya peningkatan pengetahuan agama Islam dan penyebar luasannya (dakwah), pesantren juga berperan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat sekitar. Sejarah mencatat bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan yang sudah lama terkenal sebagai wahana pengembangan masyarakat (*community development*). Di samping itu, pondok pesantren berfungsi sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) dan pembebasan pada masyarakat dari ketertindasan, keburukan moral, politik, kemiskinan.[3]

2. Anak Terlantar dan Kemiskinan

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan *khusus(children in need of special protection).* Dalam Buku Pedoman Anak Terlantar yang dikeluarkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2001) disebutkan bahwa yang disebut anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
Namun demikian faktor yang dominan penyebab munculnya anak terlantar masih disepakati karena aspek kemiskinan.

---

[2]Abd. Chayyi Fanany *Pesantren Anak Jalanan.*(Surabaya: Alpha, 2008). Hal. 75.
[3]*Ibid*. hal. 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemiskinan, sebagaimana diuraikan Chamber, [4] merupakan gejala kompleks dan multidimensional yang memiliki lima dimensi yang saling terkait. Diantara adalah: *Pertama,* kemiskinan merupakan faktor yang paling menentukan dibandingkan faktor-faktor lainnya. Kemiskinan mengakibatkan kelemahan jasmani karena kekuarangan makan, yang pada gilirannya menghasilkan ukuran tubuh yang lebih kecil, kekurangan gizi menjadikan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan serangan penyakit rendah, padahal tidak ada uang untuk berobat. Lalu orang pun tersisih karena tidak mampu membiayai sekolah, membeli pesawat radio dan sepeda, menyediakan ongkos untuk mencari kerja, atau bertempat tinggal di dekat pusat keramaian dan di pinggir jalan besar. Orang menjadi rentan terhadap keadaan darurat atau kebutuhan mendesak karena tidak mempunyai kekayaan dan menjadi tidak berdaya karena kehilangan kesejahteraan dan mempunyai kedudukan yang rendah. Orang miskin tidak mempunyai suara.

Kedua, kemiskinan adalah masalah kerentanan *(vulnerability).* Kerentanan ini dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin menghadapi situasi darurat. Perbaikan ekonomi keluarga miskin yang dicapai dengan susah payah, sewaktu-waktu dapat lenyap, misalnya, ketika penyakit menghampiri keluarga mereka yang membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah besar. Keadaan ini seringkali memaksa mereka mengorbankan harta bendanya yang paling berharga. Di bidang pendidikan kerentanan kelompok miskin juga bersumber dari meningkatnya bahan baku, inflasi dan perubahan ekonomi makro.

Ketiga, kemiskinan adalah masalah ketidakberdayaan. Bentuk ketidakberdayaan kelompok miskin tercermin dari ketidakmampuan mereka menghadapi elit dan para birokrat dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasibnya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya. Seringkali, kelompok miskin oleh para elit dan birokrat dijadikan sebagai alat untuk menjaring bantuan yang tidak mereka nikmati hasilnya. Kemiskinan merupakan manifestasi dari hubungan ketergantungan kepada para birokrat, pemilik tanah dan modal, pelepas uang (rentenir), dan sebagainya.

---

[4] Robert Chamber, *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang,*(Jakarta: LP3ES, 1988).. Hal. 44-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, kemiskinan juga merupakan masalah lemahnya ketahanan fisik karena rendahnya konsumsi pangan, baik kuantitas maupun kualitas sehingga konsumsi gizi mereka sangat rendah yang berakibat pada rendahnya produktivitas mereka.

Kelima, kemiskinan adalah masalah keterisolasian. Bentuk keterisolasian ini tidak hanya terwujud dalam keterisolasian fisik, tetapi juga sosial. Keterisolasian fisik tercermin dari ketertutupan dan terintegrasinya masyarakat miskin dengan kehidupan masyarakat yang lebih luas.

Nasikun berpendapat bahwa kondisi sesungguhnya yang harus dipahami mengenai kemiskinan adalah sebuah fenomena *multifaset*, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap".[5]

Berkaitan dengan penyebab keterisolasian masyarakat miskin di kota menurut Musiyam[6] terdapat dua pandangan. *Pertama,* pandangan yang melihat bahwa keterisolasian masyarakat miskin kota terjadi karena ketidakmampuan mereka berintegrasi dengan sistem ekonomi dan politik yang ada. Akibatnya, mereka menyatu dalam kantong-kantong masyarakat miskin dan membentuk sistem sosial tersendiri sebagai penegasan identitas mereka. Pandangan ini dianut oleh para penganjur teori kebudayaan kemiskinan.

Kedua, pandangan yang melihat bahwa keterisolasian masyarakat miskin kota disebabkan sistem yang ada tertutup bagi aspirasi dan kepentingan mereka.

---

[5] Nasikun. "Kemiskinan di Indonesia Menurun". Dalam Bagong Suyanto (Ed). *Perangkap Kemiskinan, Problem, dan Strategi Pengentasannya*. (Surabaya: Airlangga Univercity Press, 1995). hal 11.

[6] Muhammad Musiyam dan M. Farid Wajidi, *Kerentanan dan Jaring Pengaman Sosial (Rumah tangga miskin kampung kota).* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hal. 8-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka mengelompok dalam kantong-kantong kemiskian bukan karena marginal atau memiliki budaya kemiskinan, tetapi karena ada proses marginalisasi sebagai akibat himpitan struktural sistem ekonomi dan politik. Himpitan itu tidak hanya berasal dari tekanan struktur internal, tetapi juga struktur eksternal (global).

Di samping itu, kebijakan pemerintah seringkali menjadi katalis dari kemiskinan. Kebijakan pembangunan politik yang berdasar pada konsep massa mengambang *(floating mass)*, misalnya, menyebabkan kelompok miskin di Indonesia kehilangan *patron* politik yang mampu memperjuangkan aspirasi ekonomi dan melindungi mereka dari perlakuan yang tidak adil, baik yang datang dari elit birokrasi mapun kekuatan-kekuatan lain yang bekerjasama dengan elit birokrasi.

Salah satu kesulitan utama untuk menangani masalah anak yatim, miskin, dan terlantar secara efektif adalah karena pihak-pihak pemegang kebijakan masih belum memiliki data yang akurat tentang profil dan seluk-beluk kehidupan anak yatim, miskin, dan terlantar, terutama setelah jumlah mereka melonjak drastis akibat situasi krisis ekonomi yang menyebabkan penelantaran dan pembuangan anak yang dilakukan oleh kedua orang tua.

Selama ini upaya yang dilakukan untuk menangani anak yatim, miskin, dan terlantar biasanya dilaksanakan dengan berusaha mengeluarkan mereka dari jalanan, memasukkannya ke berbagai rumah singgah, tempat-tempat pelatihan, dan sejenisnya, dengan harapan setelah diberi bekal keterampilan tertentu, kemungkinan mereka untuk kembali ke jalanan dapat dieliminasi. Namun, tidak semua tempat atau yayasan mau untuk menampung dan merawat anak-anak tersebut. Bahkan yayasan panti asuhan baik milik NU atau Muhammadiyah tidak mau menerima anak-anak ini dengan alasan mereka sangat nakal. Tidak jarang upaya untuk membersihkan kota dari kehadiran anak-anak jalanan dengan dalih demi ketertiban dan keamanan atau yang lain, dilakukan dengan cara menangkap atau merazia mereka, memasukkan mereka ke tempat anak-anak nakal, atau tindak kekerasan lainnya. Hal ini merupakan bentuk penanganan penanggulangan anak terlantar yang relatif salah dan tidak tepat. Untuk menangani permasalahan anak terlantar secara tuntas, yang dibutuhkan anak-anak yatim, miskin, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlantar bukanlah program bantuan yang sifatnya kreatif atau paket-paket program yang di dropping begitu saja dari pusat. Tetapi perlu penanganan yang menyentuh pada aspek kebutuhan lahir dan batin anak-anak.[7]

3. Persoalan Anak Yatim Yang Miskin dan Terlantar

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekadar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*chlid abuse*).[8]

Secara teoritis, penelantaran adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan motivasi/intensi. Disengaja atau tidak, jika ada anak dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak untuk melindungi dari berbagai macam penyakit dan bahaya, maka insiden ini dikatakan penelantaran dan akan dikenakan sanksi.

Sebagian anak yang terlantar, terutama anak yatim atau yatim piatu, umumnya mereka tinggal di panti dan hidup di bawah asuhan pengelola panti. Tetapi, di Surabaya sebagian anak yang terlantar diduga juga banyak yang masih tinggal di luar panti, hidup di bawah pengasuhan orang tua atau kerabatnya tetapi bukan jaminan bahwa kelangsungan dan upaya pemenuhan haknya sebagai anak benar-benar terjamin. Bagi anak-anak yang terlantar, apa yang menjadi kebutuhan mereka sebenarnya memang bukan sekadar memperoleh perlindungan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi yang tak kalah penting adalah bagaimana

---

[7]Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta: Kencana, 2010). Hal.: 119
[8] *Ibid*. hal. 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dapat memperoleh jaminan dan kesempatan untuk dapat tumbuh kembang secara wajar. Sekalipun banyak masyarakat akan bersimpati dan peduli kepada nasib anak-anak yang terlantar, tetapi dalam kenyataan mereka tetap saja rawan diperlakukan salah, menjadi korban eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi, dan diterlantarkan atau bahkan dilanggar haknya.

Dari segi sosial dan psikologis, ancaman yang dihadapi anak-anak terlantar sesungguhnya tidak kalah berbahaya. Di tingkat individu, anak-anak yang sejak dini terbiasa diterlantarkan, maka jangan heran jika mereka kemudian tumbuh inferior, rendah diri atau sebaliknya agresif dan nakal untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bahkan, tidak mustahil anak-anak yang diterlantarkan kemudian terlibat dalam tindak kriminal karena salah asuhan dan pergaulan.[9]

4. Pendidikan Alternatif Pendidikan Bagi Kaum Terpinggirkan

Pendidikan merupakan bagian dari aksi kultural maupun transformasi sosial.[10] Sebagai bagian dari aksi kultural, pendidikan menjadi salah satu bentuk usaha manusia dalam rangka mempertahankan keberlangsungan eksistensi kehidupan maupun budaya mereka. Berbagai kebudayaan dan keyakinan umat manusia, sesungguhnya terus menerus berusaha untuk menjaga dan mempertahankan penyelenggaraan pendidikan secara turun temurun. Dengan kata lain, pendidikan sesungguhnya merupakan salah satu bentuk strategi tertua bagi manusia untuk mempertahankan keberlangsungan eksistensi mereka.

Dalam pengertian di atas, kegiatan pendidikan di lingkungan mana pun, dan kapanpun akan selalu menjadi kegiatan "pembelajaran", bukan kegiatan `pengajaran'. Ditegaskankan oleh Psikolog pendidikan Katharian Salfrank bahwa tiga pilar pendidikan adalah cinta, pelaksanaan hidup harian dan aturan-aturan. Cinta adalah dasar pendidikan, tapi cinta baru terwujud dalam hidup harian. Untuk itu pendidikan memerlukan atura-aturan. Dengan ketiga hal itu, anak dilatih untuk bebas di satu pihak, dan bertanggung jawab di lain pihak.[11]

---

[9]*Ibid*. 217.
[10] Mansour Fakih, "Ideologi Dalam Pendidikan" Dalam kata pengantar William F. O'neil. (2002) *Ideologi-Ideologi Pendidikan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[11] Sindhunata. "Anak Hanyalah Beban" *BASIS*. No. 07-08, Tahun ke 55. 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring itu pula, penyelenggaraan pendidikan mulai dirasakan semakin tidak terbebas dari kepentingan sosial politik dan ekonomi. Bahkan pendidikan lambat laun dirasakan telah digunakan oleh para penguasa demi melanggengkan atau melegitimasi dominasi mereka. Pemerintah menggunakan segala instrumen kekuasaannya demi kepentingan ekonomi-politiknya.

Bentuk pendidikan alternatif yang diinisiatifkan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat sangat bervariatif dan sesuai dengan komunitas yang selama ini menjadi mitra mereka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis, lokasi Pondok Pesantren Al-Hafizh yang berlokasi di di Jalan Kalilom Lor Indah Gang Anggrek No.148 Surabaya berada pada wilayah administratif Kecamatan Semampir Surabaya. Sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah ini adalah kaum urban yang datang dari utara kota surabaya, yaitu Madura. Tingkat kemiskinan di kecamatan ini merupakan yang tertinggi di kota Surabaya. Lokasi pesantren ini pun tak jauh dari Tol Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. Kaum urban dari Madura yang mendominasi wilayah ini, tinggal bersama dengan kaum urban lain yang datang dari wilayah Gerbangkertosusilo. Kesan sebagai wilayah yang lusuh dan kumuh mudah dijumpai di banyak sudut. Jika musim hujan tiba maka jalanan menjadi becek dan selokan *mampet* sehingga menimbulkan bau tidak sedap.

1. Profil Anak Yatim, Miskin dan Terlantar

Potret anak yatim, miskin dan terlantar yang terabaikan secara fisik, mental, spiritual dan sosial, sangat terlihat jelas pada penghuni pesantren ini. Pengalaman dan bukti otentik tentang kondisi riil santri anak yatim, miskin dan terlantar yang mendiami pesantren ini, selama ini menyajikan informasi yang tidak pernah akurat. Data yang bisa menginformasikan baik tentang jenis kelamin dan rentang usia pada kondisi anak tersebut, bahkan tidak bisa didokumentasikan dengan baik oleh pihak lembaga sendiri. Apalagi kalau pihak lembaga ditanya tentang kondisi para orang tuanya, baik kondisi pendidikan, pekerjaan maupun penghasilan orang tua. Pengelola pesantren, seakan tidak memperdulikan asal-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usul para anak didiknya. Pihak pengelola sangat minim memiliki informasi tentang status mereka.

Fenomena yang juga tidak kalah penting adalah bentuk fisik diantara mereka yang nampak dari ciri-ciri sebagai berikut: kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus dan pakaian tidak terurus sangat kasat mata maka tidak mengherankan apabila kondisi tingkat pemenuhan berbagai kebutuhan baik kebutuhan fisilogis, kebutuhan akan rasa amana dan kebutuhan akan rasa memiliki sangat jauh dari kata tercukupi. Ciri-ciri tersebut menunjukkan sebuah ciri sub kultur yang menempatkan mereka pada kategori sebagai anak yang termarginalkan dari lingkungan keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

2. Dehumanisasi Anak

Dehumanisasi anak adalah segala upaya pengondisian anak sesuai label yang 'diciptakan' baik oleh penguasa, masyarakat bahkan keluarga yang telah mencerabut kebebasan anak untuk menjadi dirinya sendiri dan mencapai yang terbaik yang dia bisa.

Pada tataran makro, tampak bahwa peran negara dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi rakyatnya tidak maksimal ikut menyebabkan jumlah anak terlantar terus mengalami peningkatan. Data yang dirilis oleh Mensos mengatakan jumlah anak terlantar di Indonesia masih mencapai 4,8 juta dengan berbagai latar belakang masalah sosial yang memiliki kategori berbeda-beda seperti: *child abuse*, pekerja anak, anak-anak yang dilancurkan, anjal, anak terlantar, perdagangan dan penculikan anak, anak korban pedofilia dan pengungsi anak.[12] Data yang sama juga menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Sosial (Kemensos RI) jumlah anak terlantar atau anak jalanan di Indonesia hingga tahun 2010 tercatat sebanyak 3.115.777 jiwa.[13]

Menurut Johannes Muller (1980), kemiskinan dan ketimpangan struktur institusional adalah variabel utama yang menyebabkan kesempatan masyarakat-khususnya anak-anak- untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan yang memadai,

---

[12] http://www.beritasatu.com/nasional/127057-mensos-2014-indonesia-bebas-anak-jalanan.html diakses pada 13-11-2013

[13] http://pta.trunojoyo.ac.id/uploads/journals/090531100019/090531100019.pdf diakses pada 13-11-2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih pendidikan menjadi terhambat. Studi yang dilakukan White (1973), misalnya memberikan bukti nyata. Di lingkungan rumah tangga desa di Jawa, anak-anak dari keluarga miskin terpaksa ikut bekerja dan mencari nafkah. Di sini,anak-anebut tidak terbatas hanya bekerja membantu orang tua, melainkan juga bekerja di sektor publik sebagai buruh upahan (Mulandar (ed), 1996).[14]

Potret buram masalah sosial anak sebagai fenomena sosial tidak bisa lagi dipahami sekadar kasus yang bersifat insidental atau temporer belaka. Sebuah tolok ukur dari realitas dehumanisasi anak menyajikan informasi bahwa bentuk-bentuknya sangat beraneka ragam dan menjadikan anak terlempar dari masyarakat *(dispalced children)*.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa dampak dehumanisasi anak adalah sebuah kegagalan dalam mendidik anak untuk mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Implikasi selanjutnya adalah gagalnya anak melanjutkan sekolah dan mendorong anak untuk mencari nafkah untuk keluarga dengan kondisi fisik yang lemah.

3. Pendekatan Kelembagaan terhadap Permasalahan Anak

Fakta tentang permasalahan sosial anak dan tidak adanya optimisne negara untuk memberikan solusinya tidak serta merta membuat masyarakat menerima kondisi ini apa adanya. Informasi yang sedikit menggembirakan adalah LSM lokal, pondok pesantren, dan forum masyarakat banyak memprakarsai berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap berbagai masalah sosial anak.

Pondok Pesantren Al-Hafizh merupakan yayasan untuk belajar para anak yatim, anak miskin, dan anak terlantar. Pondok pesantren ini terletak di Jalan Kalilom Lor Indah Gang Anggrek No.148 Surabaya. Pondok pesantren ini berdiri sejak empat tahun silam yang didirikan tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2009 oleh Ustadz Muhammad Suci. Dia berasal dari Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Pondok pesantren Al-Hafizh ini mengajarkan pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan sekolah baik untuk

[14] Bagong Suyanto (2010). *Masalah Sosial Anak.* Jakarta: Kencana Group. Hal : 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MI, MTS, dan MA. Sedangkan untuk pendidikan non formal yaitu mengaji Iqra', Al-Qur'an, diniyah, shorof, dan lain sebagainya.[15]

Kondisi santri di masa awal berdirinya pesantren Al-Hafizh ini pada tahun 2009, kebanyakan anak-anak berasal dari anak yatim, mantan anak jalanan, mantan anak brandalan, dan sejenisnya. Kehidupan anak-anak tersebut dulunya sangat keras. Di usia mereka yang masih sangat kecil, mereka harus kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anak-anak itu, menjadi pekerja anak disebabkan oleh rendahnya aspirasi orang tua tentang arti pentingnya pendidikan bagi anak.

Sarana dan prasarana yang dimiliki pesantren bisa dibilang amat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Salah satu penyebab dari kondisi seperti ini adalah karena pesantren tidak memungut biaya dari para santri untuk pengembangan sarana fisik dan non fisik pesantren. Bahkan kehidupan para santri kesehariannya ditanggung oleh pesantren. Namun, pesantren ini tidak memiliki sumber dana yang tetap. Yayasan ini masih menggantungkan bantuan dari masyarakat sekitar atau dari teman-teman Ustadz Muhammad Suci yang sama-sama kyai atau Ustadz.

Dengan demikian pesantren sebagai salah satu bentuk dari pendidikan alternatif adalah salah satu metode pendidikan yang seharusnya dianggap sama dengan pendidikan formal. Fakta, pesantren merupakan institusi pendidikan yang tertua di Indonesia tidak terbantahkan. Sejarah pendidikan nasional menyebutkan, pesantren ada sejak abad 7 bersamaan dengan masuknya agama Islam di Tanah Air. Pesantren merupakan miniatur masyarakat, tempat berlangsungnya interaksi sosial antara stratafikasi sosial yang berbeda, baik secara vertikal maupun horisontal. Hubungan antara kiai dan santri, antar guru dan murid, dan antara murid dan murid yang memiliki latar belakang sosial yang berbeda diikatkan oleh ikatan emosionalitas keagamaan yang kental, proses pembelajaran yang intensif dan efektif, serta cita-cita sosial yang sama dalam membumikan syariah Islam.

---

[15]Hasil diskusi dengan Ustadz Rozi dan Ustadz Shobah selaku pengurus pondok pada tanggal 9 September 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain, bagi Pesantren Al-Hafizh, memperlakukan para santri anak yatim, miskin, dan terlantar itu dengan baik. Para pengasuh pesantren membina, mengayomi, mendidik, membimbing, mengarahkan dan memonitoring para santri anak terlantar dengan sabar. Tidak hanya itu, pesantren memenuhi kebutuhan sehari-hari para santri tersebut. Misalnya, mengenai fasilitas tempat istirahat, tempat belajar, kebutuhan makan dan minum, sabun cuci, dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya. Para santri pun memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan pesantren dengan baik.

Pesantren Al-Hafizh ini mempunyai inisiatif menampung anak yatim, miskin, dan terlantar karena pesantren ini ingin menolong menanggulangi keberadaan anak terlantar, bahkan pesantren bercita-cita ingin menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan. Pesantren ingin menampung siapa saja yang ingin menjadi santri di pesantren. Pesantren ingin memberdayakan, memberkahi, dan mengembalikan komunitas anak terlantar yang nyantri untuk kembali ke rumah-rumah mereka dengan bekal ilmu yang cukup. Semenjak berdirinya pesantren, pesantren mempunyai cita-cita seperti itu. Komunitas santri anak yatim, miskin, dan terlantar berasal dari daerah yang beragam: Surabaya, dan Jakarta.

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan, pesantren dihadapkan pada beberapa perubahan sosial seperti; kemajuan teknologi informasi, dinamika sosial-politik, perubahan yang terbingkai dalam dinamika masyarakat dan belum lagi sejumlah dinamika internal pesantren sendiri. Semuanya berujung pada pertanyaan tentang resistensi, responsibilitas, kapasitas dan kecanggihan pesantren dalam menghadapi perubahan besar itu.

Keterbatasan guru atau tenaga pengajar ini menyebabkan proses belajar mengajar siswa lambat dan pasti menjadi terhambat. Ketika para guru-guru tersebut tidak bisa mengajar karena pulang atau ada halangan, maka proses belajar mengajar itu akan diliburkan. Suasana yayasan Al-Hafizh yang dulunya selalu ramai dengan gurauan anak-anak, pengasuh pondok, pengurus pondok, dan juga masyarakat sekitar pondok ini, berubah menjadi suasana yang memanas antara anak-anak, pihak pondok dan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia sendiri, sikap pemerintah terhadap pekerja anak tampak jelas ditandai dengan sejumlah ambivalensi (White dan Tjandraningsih, 1998 dalam Suyanto.[16] Meski dari segi hukum pemerintah telah memperlihatkan komitmen yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan kesediaan pemerintah untuk meratifikasi sejumlah konvensi tentang perlunya pembatasan dan penghapusan pekerja anak di sektor-sektor tertentu, namun dalam praktek sering terjadi berbagai toleransi dan bahkan sama sekali tidak ada tindakan yang nyata untuk mengimplementasikan aturan yang sudah ada secara memadai. Menurut White dan Tjandraningsih, sejak kemerdekaan Indonesia hingga sekarang sepertinya belum pernah ada sanksi yang dijatuhkan bagi pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur minimum. Di sisi lain, yang paling menyulitkan bagi upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak adalah kenyataan bahwa sebagian besar anak ternyata lebih banyak berada di sektor-sektor informal, yang secara legal berada di luar jangkauan para pengawas tenaga kerja dan tidak memperoleh perlindungan hukum sama sekali.

Dengan demikian, ilustrasi tersebut seharusnya mulai menyodorkan kesadaran bagi negara untuk kembali melakukan revitalisasi kebijakan publiknya demi menafkahi kebutuhan rakyat kecil yang sekian lama telah digencet. Proses kesejahteraan sosial merupakan badan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi.

Pesantren merupakan institusi sosial yang mengalami dialektika. Hal ini terjadi lantaran proses perubahan di dalam dan di luar pesantren. Semula pesantren ditempatkan sebagai sub-kultur, sebagai agen community development (pembangunan komunitas) desa dan masyarakat pinggiran, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sampai menjadi model pendidikan alternatif. Konteks sosiologis pesantren tersebut merupakan hasil dari proyeksi masyarakat pesantren sendiri, pemerintah dan masyarakat umum yang memerankankan pesantren dalam bidang pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi.

Zaman telah memaksa pesantren melakukan perubahan internal. Di tengah atmosfir dunia pendidikan dan dunia ketenagakerjaan yang mengharuskan pendidikan formal dan tenaga kerja yang berijazah, maka banyak pesantren yang

---

[16] Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya.*(Surabaya: Airlangga University Press, 2003). Hal: 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelenggarakan pendidikan formal tersebut, dan mencetak SDM pesantren yang berkompetensi di bidangnya masing-masing. Atmosfir di atas berlahan-lahan tapi pasti mendorong lahirnya konstruksi sosial baru. Sementara, konstruksi sosial baru ini merupakan hasil interrelasi sosial antara pesantren dengan pesantaren, antara pesantren dengan dunia pendidikan dan antara pesantren dengan masyarakat umum.

D. KESIMPULAN

Masalah sosial anak, dimana anak merupakan kelompok yang tergolong akan tumbuh menjadi kelompok usia produktif dan merupakan sumber daya manusia yang akan menjadi penerus bangsa, tidak mendapat perhatian yang cukup baik oleh negara. Prioritas konstitusional agar negara berperan aktif dalam membangun manusia agar lebih bermartabat, menjadi antitesis dengan kondisi objektif mutu hidup manusia Indonesia saat ini terlebih dengan mencuatnya berbagai masalah sosial anak yang meliputi berbagai kriteria seperti: *child abuse,* pekerja anak di sektor berbahaya, anak-anak yang dilacurkan, anak jalanan, anak terlantar, anak perempuan korban pelecehan dan kekerasan seksual, perdagangan dan penculikan anak, anak korban *pedofilia,* pengungsi anak adan anak-anak yang putus sekolah dan rawan DO. Martabat (*integrity*) manusia Indonesia menjadi buram karena balutan kemiskinan, dan mutu hidup mayoritas manusia Indonesia yang masih di bawah standar minimum. Di tambah dengan jaringan sosial sangat minim dikembangkan lintas institusi negara, institusi keagamaan, institusi etnis, dan institusi golongan. Penanganan anak terlantar dan yatim piatu hanya menjadi dominasi lembaga pemerintah (Kementerian Sosial); dan institusi lainnya yang didaulat untuk ikut berpartisipasi, sebab ketiadaan dana, daya dan sumberdaya manusia yang memadai namun tidak bisa berjalan maksimal.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa dampak dehumanisasi anak adalah sebuah kegagalan dalam mendidik anak untuk mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Implikasi selanjutnya adalah gagalnya anak melanjutkan sekolah dan mendorong anak untuk mencari nafkah untuk keluarga dengan kondisi fisik yang lemah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesantren sebagai alternatif pendidikan baru di tengah-tengah kegagalan lembaga pendidikan lain dalam membina moral dan life skill (keterampilan hidup), mulai dilirik oleh banyak pihak. Suasana keagamaan yang semarak di pesantren merupakan nilai plus yang menjadi energi sendiri dan semakin mengukuhkan keberadaan pesantren sebagai lembaga yang dibutuhkan dalam masyarakat di Indonesia. Peran dan kiprah pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan, terutama wajib belajar 9 tahun, kelompok belajar fungsional, kursi-kursi keterampilan, pelatihan kewirausahaan, penyediaan klinik kesehatan masyarakat, dan seterusnya akan mendorong peningkatan IPM Indonesia secara langsung atau tidak.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial merupakan salah satu agen pembangunan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan masyarakat demi mencapai tujuan dan sasaran yang tepat dalam pengembangan masyarakat yang penuh dinamika. Dinamika kehidupan pesantren pun tak pernah lelah untuk menghadapi tantangan perubahan. Keberadaan pesantren justru membuktikan bahwa pesantren adalah institusi yang terbukti telah teruji keberadaannya di tengah terpaan perubahan yang selalu mengiringi masyarakat. Meskipun terjadi perubahan di sana-sini, baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas namun demikian pesantren justru membuktikan dirinya sebagai lembaga yang memang dibutuhkan oleh sebagian masyarakat.

Di sisi yang lain, sebagai salah satu institusi sosial, pesantren tidak bisa mengelak dari irama dialektika yang berjalan seiring dengan perubahan yang mengiringinya. Hal ini terjadi lantaran proses perubahan berasal dari dalam dan di luar pesantren. Kondisi konflik internal yang dialami oleh Pesantren Al-Hafizh, dan berimbas pada interaksi dengan masyarakat sekitarnya, semakin menyudutkan peran pesantren yang baru saja belum genap berusia 5 tahun dan sangat tergantung pada kemampuannya untuk bertahan dalam jangka waktu yang tidak diketahui kapan berakhir.

Sementara itu, di Indonesia sendiri, sikap pemerintah terhadap pekerja anak tampak jelas ditandai dengan sejumlah ambivalensi. Meski dari segi hukum pemerintah telah memperlihatkan komitmen yang tinggi, hal ini dibuktikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kesediaan pemerintah untuk meratifikasi sejumlah konvensi tentang perlunya pembatasan dan penghapusan pekerja anak di sektor-sektor tertentu, namun dalam praktek sering terjadi berbagai toleransi dan bahkan sama sekali tidak ada tindakan yang nyata untuk mengimplementasikan aturan yang sudah ada secara memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Chamber, Robert. *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang.* Jakarta: LP3ES. 1988.

Fanany, Abd. Chayyi. *Pesantren Anak Jalanan.* Surabaya: Alpha, 2008.

Musiyam, Muhammad dan M. Farid Wajidi. *Kerentanan dan Jaring Pengaman Sosial (Rumah tangga miskin kampung kota).* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.

O'neil, William F. *Ideologi-Ideologi Pendidikan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Sindhunata. "Anak Hanyalah Beban" *BASIS*. No. 07-08, Tahun ke 55. 2006.

Suyanto, Bagong (Ed). *Perangkap Kemiskinan, Problem, dan Strategi Pengentasannya*. Surabaya: Airlangga Univercity Press,1995.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak.* Jakarta: Kencana Group, 2010.

Suyanto, Bagong. *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya.* Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/08/18/mrpo4p-tingkat-kemiskinan-2013-akan-lebih-tinggi-dari-target-pemerintah

http://www.beritasatu.com/nasional/127057-mensos-2014-indonesia-bebas-anak-jalanan.html diakses pada 13-11-2013

http://pta.trunojoyo.ac.id/uploads/journals/090531100019/090531100019.pdf diakses pada 13-11-2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id